



# Kepsek Dibekali Pemahaman KIP

**SETU** - Peran lembaga publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat diharapkan bisa terwujud sepenuhnya. Hal ini agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat diterapkan maksimal.

Hal tersebut terungkap dalam seminar pelatihan jurnalistik dan KIP yang digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangsel yang diikuti ratusan kepala sekolah se-Tangsel di Puspipetek, Setu, kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel Mathoda mengatakan, KIP merupakan tanggungjawab aparaturnya pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Untuk itu, dirinya mengharapkan pihak sekolah bisa memberikan informasi kepada para pemohon informasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. "UU-nya sudah jelas. Pemahaman KIP juga harus diberikan kepada pihak sekolah," ungkapnya.

Menurut Mathoda, sampai saat ini pihaknya masih me-

iliki kendala dalam menerapkan KIP. Pasalnya, banyak oknum yang mengaku wartawan atau LSM kerap datang ke sekolah-sekolah. Hal ini kadang membuat pihak sekolah ketakutan dalam menghadapi wartawan dan LSM. "Masalah ini tak boleh terjadi berlarut-larut. Harus ada solusi agar penerapan KIP tetap terlaksana," katanya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Dishubkominfo Kota Tangsel Firman mengatakan, KIP harus dipahami kepada seluruh lapisan aparaturnya pemerintah. Lantaran, pemerintah daerah dalam hal ini bertindak sebagai lembaga publik yang menyediakan informasi untuk masyarakat.

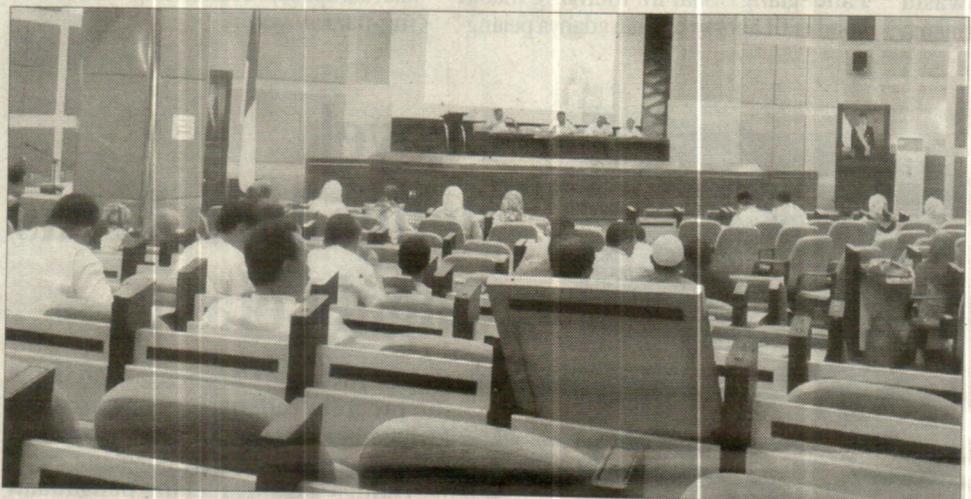
"Selain itu, aparaturnya pemerintah juga harus dibekali pengetahuan jika nanti ada sengketa informasi yang terjadi," ujarnya.

Kata Firman, fungsi KIP untuk menciptakan pemerintahan yang baik good government, yaitu tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. "Penerapan KIP ini sangat bermanfaat bagi

masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi," terangnya.

Menurut Firman, KIP memiliki peran penting dalam mempercepat kemajuan pembangunan. Dengan sistem transparansi pemerintahan serta keterbukaan data dapat membantu memperbaiki kinerja aparaturnya sipil negara sebagai pelayan masyarakat. Saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap kebebasan memperoleh informasi publik secara transparan, merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan kredibel.

"Berikan informasi publik yang diminta masyarakat dengan cepat, tepat dan selamat. Penuhi permintaan itu jika memang dilakukan sesuai koridor. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh ada informasi publik yang tersebar ke masyarakat atau diminta pihak manapun yang dipenuhi yang tidak melalui proses atau mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan," pungkasnya. (riz)



Suasana sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang digelar Dinas Pendidikan di gedung Grha Widya Bhakti (GWB) Puspipetek, Setu.

RIZKI